

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dituntut untuk dapat melakukan perubahan secara proaktif kearah perbaikan.

Dengan tersusunnya Renja ini maka Sekretariat Daerah mempunyai acuan tentang pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Painan, 22 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi		I
DaftarTabel		II
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	23
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	37
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	55
	3.2 Tujuan dan Sasaran	55
	3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
BAB V	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	24
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	41
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026	56
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	61
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra yang telah ditetapkan ditinjau kembali sesuai dengan rasionalisasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan pohon kinerja dan cascading Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 pada awal Tahun 2025, untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), penyesuaian untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan dan perubahan aturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan

lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Penyusunan Renstra-PD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan.
- c. Pemda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja PD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.
- d. Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2026. Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja dan review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021tentangHasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiranKlasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;**
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
 14. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor....Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.**

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana Program dan Kegiatan Pembangunan di bidang ke Sekretariatan Daerah;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan Kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
3. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Bagian –Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses Penyusunan Renja, keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK. Dan kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan RKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.
3. Peluang dan tantangan dalam peningkatan pelayanan, dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awalRKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berisikan rencana program dan kegiatan mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, antara lain meliputi:

- 3.1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- 3.2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut Sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatianrangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 senilai Rp. 33.132.734.601,00,- (Tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) terdiri dari 3(Tiga) program dan 18 (Delapan belas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) Sub Kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. 18.865.325.609,- (Delapan belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam rupiah) pada Triwulan 2 ,untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 91-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara 65-74%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-64%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2025 terdapat 14 kegiatan yang dengan status capaian "Tinggi" (94,86%).Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 sebagaimana berikut :

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

TABEL 2.1										
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026 KABUPATEN PESIR SELATAN										
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		K	K	K	K	K	K	K	K
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	97 Orang	97 Orang/Bulan	97 Orang/Bula	100%	97 Orang/Bulan	97 Orang/Bulan	100%

							n							
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	20%	20%	10%	10%	0%	10%	10%	0%
4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	10 Orang	10 Orang	0
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

						Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100%	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100%
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	100%	±400 Org	±400 Org	100%

4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	37,1 (Tinggi)	NA	NA	NA	100%	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	100%
						Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Nilai RB General	71,00	69,38	69,38	69,38	100%	70,00	70,00	100%
						Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	12,56	12,14	12,14	12,14	100%	12,35	12,35	100%
						Indeks Kepuasan Masyarakat	91,55%	91,49%	91,49%	91,49%	100%	91,52%	91,52%	100%
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	100%	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)	100%
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen (Hasil Surfey Internal,	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road	3 dokumen (Hasil Surfey Internal,	3 dokumen (Hasil Surfey	100%	3 dokumen (Hasil Surfey Internal,	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road	100%

			Road Map 2021-2026, Indek RB)	Map 2021- 2026, Indek RB)	Road Map 2021-2026, Indek RB)	Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)		Road Map 2021-2026, Indek RB)	Map 2021- 2026, Indek RB)	
4 01 01 2,13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokum	1 Dokum	1 Dokum	1 Dokum	100%	1 Dokum	1 Dokum	100%
4 01 01 2,13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokum	1 Dokum	1 Dokum	1 Dokum	100%	1 Dokum	1 Dokum	100%
4 01 01 2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 01 2,14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
4 01 01 2,14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
4 01 01 2,14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 02 2,01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 02 2,01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 02 2,01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4 01 02 2,01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

						Daerah							
4	01	02	2,02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	01	02	2,02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1	1	1	100%	100%
4	01	02	2,02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	38	38	35	35	100%	100%
4	01	02	2,02	03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	3	3	3	100%	100%
4	01	02	2,03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	2,03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	100%	100%
4	01	02	2,03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar	100%	100%

							Hukum			Hukum	Sadar Hukum			Hukum		
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD	100%	20 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD	100%		
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	27 Dokumen	27 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	25 Dokumen	100%		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	80%	80%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD	1 Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	100%	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	100%		
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian an Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	100%	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	100%		
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	100%	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	100%		
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	80%	80%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	01		2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0	0	0	0	100%	0	0	100%		
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%	6 kali	6 kali	100%		

4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,05%	79,05%	79,04%	79,04%	79,04%	79,04%	79,04%	79,04%
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
---	----	----	------	----	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi. Perbaikan dan peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar Perangkat Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

TABEL 2.2													
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN													
NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			97 Orang/Bulan	97 Orang	97 Orang	97 Orang	97 Orang	97 Orang	97 Orang/Bulan	97 Orang/Bulan	97 Orang/Bulan	97 Orang/Bulan
02	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP			10%	20%	30%	40%	50%	60%	10%	10%	10%	10%
09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
02	Jumlah Paket Peralatan dan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

	Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen	2000 Dokumen
	Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			2 Unit					2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
05	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			7 Unit	2 Unit				7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit								
	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
05	Jumlah Mebel yang Dipelihara			7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit

09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
02	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
03	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
04	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil			±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org

	Kepala Daerah												
	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
02	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
03	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah			37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)
	Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai RB General			70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja			12,35	12,56	12,77	12,98	13,19	13,4	12,13	12,14	12,35	12,56
	Indeks Kepuasan Masyarakat			91,52	91,55	91,58	91,61	91,64	91,67,00	87,48	91,49	91,52	91,55
01	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

02	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)
03	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)
04	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
05	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
01	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Keprotokolan												
02	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
03	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
03	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
01	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Mental Spiritual												
02	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			35	38	40	41	43	45	35	35	35	35
03	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk
02	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum
03	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			20 Buku LD dan 5 Buku BD	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD	20 Buku LD dan 5 Buku BD
	Efektifitas Kerja Sama Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			25 Dokumen	27 Dokumen	29 Dokumen	31 Dokumen	33 Dokumen	35 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen
	Persentase Peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			75%	80%	82%	85%	87%	90%	75%	75%	75%	75%

01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	1 Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD	1 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, 2 Data Kebijakan Dokumen yang diolah	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri
02	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 2	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 2	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 2	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1
03	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia
	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan			75%	80%	82%	85%	87%	90%	75%	75%	75%	75%
01	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
02	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
03	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan

	Tingkat Kematangan UKPBJ			40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40	40	40	40	40	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			79,04%	79,05%	80%	81%	82%	83%	79,04%	79,04%	79,04%	79,04%
01	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
02	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
03	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen
03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Kondisi Organisasi dan Aparatur.

Sekretariat Daerah sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan Prasarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar OPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya. Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 masih ditemui kendala-kendala, sehingga beberapa program dan kegiatan belum berjalan optimal sebagaimana yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang masih belum optimal pelaksanaannya diantaranya terlihat pada masih rendahnya serapan dana yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan dimaksud. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Permasalahan:

- Sulit mendata barang persediaan pada masing-masing bagian.
- Belum adanya aplikasi untuk membukukan barang persediaan .

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Permasalahan:

- Kurangnya anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum yang disebabkan karena kondisi Efisiensi Anggaran Refocusing untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan pandemi covid.
- Sulitnya memantau potensi kebutuhan dimasing-masing bagian.
- Terbatasnya anggaran.

c. Kegiatan Penataan Organisasi

Permasalahan :

- Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam memenuhi permintaan data untuk Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
- Sering tidak tepat waktu penyampaian data penilaian kinerja Perangkat

d. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Permasalahan :

- Belum terdistribusinya koran ke Nagari-nagari secara merata
- Banyaknya media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers
- Banyak wartawan yang belum memiliki kompetensi dari organisasi profesi dari organisasi profesi
- Terlalu banyak media yang bekerja untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah

- Publikasi di Media Sosial Terkait Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Masih menggunakan Perangkat Pribadi
- Masih menggunakan media Konvensional/ pajangan
- Proses penyimpanan Foto dan Video yang terbatas

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan:

- Terlambatnya Peraturan Bupati tentang Bantuan Hibah sehingga menghambat realisasi anggaran pada akhir tahun.
- Aturan Pencairan Anggaran Hibah dari Pemerintah Pusat belum jelas.

b. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Permasalahan:

- Kurangnya perhatian dari Kepala Perangkat Daerah dalam penyampaian data, sehingga data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak valid, ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data pendukung yang diberikan.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD
- Kurangnya petunjuk teknis dalam penyusunan LPPD

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan :

- Pokja Pengadaan Barang dan Jasa masih bersifat *Adhoc*, sehingga proses pengadaan barang dan jasa kurang fokus, karena anggota pokja masih dibebani dengan tanggung jawab di instansi asal mereka.

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Permasalahan :

- Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat lapor bulanan yang terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD tahun 2026 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada table 2.3. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.3											
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2026											
KABUPATEN PESISIR SELATAN											
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH											
RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	SEKRETARIAT DAERAH					SEKRETARIAT DAERAH					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	28.424.627.976	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	28.424.627.976	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	125.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	125.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	125.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	14.815.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	14.815.000.000	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	97 Orang/Bulan	14.400.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	97 Orang/Bulan	14.400.000.000	

02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	380.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	380.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	55.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	55.000.000	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan	55.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan	55.000.000	
	Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	10%	100.000.000	Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	10%	100.000.000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pesisir Selatan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pesisir Selatan	10 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.621.934.830	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.621.934.830	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	150.000.000	

02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	150.000.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	3 Laporan	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	3 Laporan	150.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	1.071.934.830	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	1.071.934.830	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan	2000 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan	2000 Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Kab. Pesisir Selatan	100%	450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Kab. Pesisir Selatan	100%	450.000.000	
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit		
02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit		
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit	400.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit	400.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	100%	3.095.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	100%	3.095.000.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pesisir Selatan	12 laporan	140.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pesisir Selatan	12 laporan	140.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 paket	1.295.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 paket	1.295.000.000	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 paket	210.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 paket	210.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 laporan	1.450.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 laporan	1.450.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.102.735.018	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.102.735.018	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	9 Unit	447.732.919	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	9 Unit	447.732.919	

02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	437.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	437.100.000	
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit	802.175.500	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit	802.175.500	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	184.590.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	184.590.600	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	55.000.000	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	176.135.999	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	176.135.999	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.890.000.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.890.000.000	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/Bulan	900.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/Bulan	900.000.000	

02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	210.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	210.000.000	
03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang	80.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang	80.000.000	
04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	±400 Org	700.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	±400 Org	700.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.400.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.400.000.000	
01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket	1.350.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket	1.350.000.000	
02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	750.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	750.000.000	
03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	300.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	300.000.000	
	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	37,1 (Tinggi)	344.958.128	Penataan Organisasi	Nilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	37,1 (Tinggi)	344.958.128	
		Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM	Kab. Pesisir Selatan	100%			Persentase Penataan Jabatan sesuai peraturan yang	Kab. Pesisir Selatan	100%		

		Baik					berlaku				
		Nilai RB General	Kab. Pesisir Selatan	71,00			Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	Kab. Pesisir Selatan	71,00		
		Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Kab. Pesisir Selatan	12,56			Indeks Pelayanan Publik	Kab. Pesisir Selatan	12,56		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	91,55%			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	Kab. Pesisir Selatan	91,55%		
01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	81.165.531	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	81.165.531	
02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	
03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	80.666.313	

04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	100	1.425.000.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	100	1.425.000.000	
		Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan	100			Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan	100		
01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	100	175.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	100	175.000.000	
02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	100	1.200.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	100	1.200.000.000	
03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	100	50.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	100	50.000.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pesisir Selatan	100%	4.010.037.923	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pesisir Selatan	100%	4.010.037.923	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	100%	250.000.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	100%	250.000.000	
01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	

02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	30.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	30.000.000	
03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	185.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	185.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pesisir Selatan	90%	3.335.037.923	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pesisir Selatan	90%	3.335.037.923	
01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pesisir Selatan	1	1.256.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pesisir Selatan	1	1.256.000.000	
02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pesisir Selatan	35	1.426.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pesisir Selatan	35	1.426.000.000	
03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	Kab. Pesisir Selatan	3	653.037.923	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	Kab. Pesisir Selatan	3	653.037.923	

		Kearsipan, Trantibum Linmas					Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		100%	380.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		100%	380.000.000	
01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pesisir Selatan	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pesisir Selatan	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	150.000.000	
02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pesisir Selatan	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	180.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pesisir Selatan	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	180.000.000	
03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Pesisir Selatan	20 Buku LD dan 5 Buku BD	50.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Pesisir Selatan	20 Buku LD dan 5 Buku BD	50.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	45.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	45.000.000	
01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pesisir Selatan	25 Dokumen	45.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pesisir Selatan	25 Dokumen	45.000.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.416.921.150	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.416.921.150	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	75%	265.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	75%	265.000.000	

01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pesisir Selatan	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pesisir Selatan	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	100.000.000	
02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	80.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	80.000.000	
03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pesisir Selatan	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	85.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pesisir Selatan	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	85.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	75%	270.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	75%	270.000.000	
01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	0	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	0	50.000.000	
02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	6 kali	150.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	6 kali	150.000.000	
03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	13 Laporan	70.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	13 Laporan	70.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kab. Pesisir Selatan	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahanka	746.921.150	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kab. Pesisir Selatan	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahan	746.921.150	

				n)					kan)		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	79,04%			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	79,04%		
01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	100.131.600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	100.131.600	
02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	546.192.150	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	546.192.150	
03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	150 orang	100.597.400	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	150 orang	100.597.400	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kab. Pesisir Selatan	100%	135.000.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kab. Pesisir Selatan	100%	135.000.000	
01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	

02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	
03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	
	TOTAL				33.851.587.049					33.851.587.049	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk bidang Koordinasi/Penunjang, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

TIDAK ADA USULAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dipengaruhi oleh kebijakan/peraturan di tingkat pusat / nasional antara lain RPJMN 2020-2024, Permendagri no 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Beberapa sasaran dan target yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 harus menjadi acuan dalam penyusunan renja 2026 yang antara lain menargetkan untuk sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola berupa indeks reformasi birokrasi minimal dengan kategori” BAIK”, Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik, Skor Sakip “BB”.

Selain itu Renja Setda Tahun 2026 sudah memperhatikan Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada Renja Tahun 2024 sudah sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga nomenklatur kegiatan juga sudah diarahkan sesuai dengan Tupoksi Setda berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah.

Sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas

pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah :
 - a. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja
 - b. Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah :
 - a. Nilai AKIP Sekretariat Daerah
 - b. Nilai Kematangan Inovasi Setda

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Tujuan, Sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretrariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah		Nilai EPPD	2,700
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	11,80
			Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	98%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	81 (A)
			Nilai Kematangan Inovasi Setda	100

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Renja ini Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program, 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan jumlah total dana Pagu indikatif sebesar Rp 33.831.587.049,-dari Dana Alokasi Umum (DAU). Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Program kerja dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Administrasi Umum
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5) Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 12) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13) Pengadaan Mebel
 - 14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 15) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 17) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 21) Pemeliharaan Mebel
 - 22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 25) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 26) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 27) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 28) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 29) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 30) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 31) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- k. Penataan Organisasi
 - 32) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 33) Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- 34) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 35) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 36) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 37) Fasilitasi Keprotokolan
 - 38) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - 39) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Administrasi Tata Pemerintahan
 - 40) Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 41) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 42) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 43) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 44) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - 45) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - 46) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 47) Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 48) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - d. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 49) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 50) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - 51) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - 52) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 53) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 54) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 55) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- 56) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 57) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- 58) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- 59) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- 60) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- 61) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2										
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026										
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027										
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah										
Kabupaten Pesisir Selatan										
Tahun 2026										
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH										
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	28.424.627.976	Dana Transfer Umum		100%	28.424.627.976	
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	125.000.000	Dana Transfer Umum		100%	125.000.000	
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum		4 Dokumen	125.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan,	Kab. Pesisir Selatan	100%	14.815.000.000	Dana Transfer Umum		100%	14.815.000.000	

		Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah								
4 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	97 Orang/Bulan	14.400.000.000	Dana Transfer Umum		97 Orang/Bulan	14.400.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum		1 Dokumen	35.000.000	
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	380.000.000	Dana Transfer Umum		12 Laporan	380.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4 01 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	55.000.000	Dana Transfer Umum		100%	55.000.000	
4 01 01 2,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan	55.000.000	Dana Transfer Umum		4 Laporan	55.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	10%	100.000.000	Dana Transfer Umum		10%	100.000.000	
4 01 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pesisir Selatan	10 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum		10 Orang	100.000.000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.621.934.830	Dana Transfer Umum		100%	1.621.934.830	

4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum		4 Paket	150.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Dana Transfer Umum			50.000.000	
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum		2 Paket	150.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	3 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum		3 Laporan	150.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	1.071.934.830	Dana Transfer Umum		12 Laporan	1.071.934.830	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan	2000 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum		2000 Dokumen	50.000.000	
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Kab. Pesisir Selatan	100%	450.000.000	Dana Transfer Umum		100%	450.000.000	
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit		Dana Transfer Umum		2 Unit		BAGIAN UMUM
4	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit		Dana Transfer Umum		2 Unit		BAGIAN UMUM
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit	400.000.000	Dana Transfer Umum		7 Unit	400.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Dana Transfer Umum			50.000.000	

4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	100%	3.095.000.000	Dana Transfer Umum		100%	3.095.000.000	
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pesisir Selatan	12 laporan	140.000.000	Dana Transfer Umum		12 laporan	140.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 paket	1.295.000.000	Dana Transfer Umum		4 paket	1.295.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 paket	210.000.000	Dana Transfer Umum		1 paket	210.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 laporan	1.450.000.000	Dana Transfer Umum		12 laporan	1.450.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.102.735.018	Dana Transfer Umum		100%	2.102.735.018	
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	9 Unit	447.732.919	Dana Transfer Umum		9 Unit	447.732.919	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	437.100.000	Dana Transfer Umum		15 Unit	437.100.000	BAGIAN UMUM

4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit	802.175.500	Dana Transfer Umum		7 Unit	802.175.500	
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	184.590.600	Dana Transfer Umum		15 Unit	184.590.600	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	55.000.000	Dana Transfer Umum		2 Unit	55.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	176.135.999	Dana Transfer Umum		2 Unit	176.135.999	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.890.000.000	Dana Transfer Umum		100%	1.890.000.000	
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/Bulan	900.000.000	Dana Transfer Umum		2 Orang/Bulan	900.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	210.000.000	Dana Transfer Umum		2 Paket	210.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang	80.000.000	Dana Transfer Umum		2 Orang	80.000.000	BAGIAN UMUM
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	Kab. Pesisir Selatan	±400 Org	700.000.000	Dana Transfer Umum		±400 Org	700.000.000	BAGIAN UMUM

		Wakil Kepala Daerah								
4 01 01 2,12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.400.000.000	Dana Transfer Umum		100%	2.400.000.000	
4 01 01 2,12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		1 Paket	1.350.000.000			1 Paket	1.350.000.000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	750.000.000	Dana Transfer Umum		1 Paket	750.000.000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	300.000.000	Dana Transfer Umum		1 Paket	300.000.000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,13	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	37,1 (Tinggi)	344.958.128	Dana Transfer Umum		37,1 (Tinggi)	344.958.128	
		Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	Kab. Pesisir Selatan	100%		Dana Transfer Umum		100%		
		Nilai RB General	Kab. Pesisir Selatan	71,00		Dana Transfer Umum		71,00		
		Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Kab. Pesisir Selatan	12,56		Dana Transfer Umum		12,56		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	91,55%		Dana Transfer Umum		91,55%		
4 01 01 2,13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	81.165.531	Dana Transfer Umum		2 Dokumen	81.165.531	BAGIAN ORGANISASI

		Jabatan								
4 01 01 2,13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	Dana Transfer Umum		4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	83.126.284	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2,13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indeks RB)	80.666.313	Dana Transfer Umum		3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indeks RB)	80.666.313	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2,13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Dana Transfer Umum			50.000.000	
4 01 01 2,13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Dana Transfer Umum			50.000.000	
4 01 01 2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	100	1.425.000.000	Dana Transfer Umum		100	1.425.000.000	
		Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	Kab. Pesisir Selatan	100		Dana Transfer Umum		100		

4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	100	175.000.000	Dana Transfer Umum		100	175.000.000	BAGIAN PROKOPIM
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	100	1.200.000.000	Dana Transfer Umum		100	1.200.000.000	BAGIAN PROKOPIM
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	100	50.000.000	Dana Transfer Umum		100	50.000.000	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pesisir Selatan	100%	4.010.037.923	Dana Transfer Umum		100%	4.010.037.923	
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	100%	250.000.000	Dana Transfer Umum		100%	250.000.000	
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum		1 Dokumen	35.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum		1 Dokumen	30.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	185.000.000	Dana Transfer Umum		3 Dokumen	185.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pesisir Selatan	90%	3.335.037.923	Dana Transfer Umum		90%	3.335.037.923	
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pesisir Selatan	1	1.256.000.000	Dana Transfer Umum		1	1.256.000.000	BAGIAN KESRA

4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pesisir Selatan	35	1.426.000.000	Dana Transfer Umum	35	1.426.000.000	BAGIAN KESRA
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Pesisir Selatan	3	653.037.923	Dana Transfer Umum	3	653.037.923	BAGIAN KESRA
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		100%	380.000.000		100%	380.000.000	
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pesisir Selatan	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	150.000.000	Dana Transfer Umum	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	150.000.000	BAGIAN HUKUM

4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kab. Pesisir Selatan	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	180.000.000	Dana Transfer Umum		3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	180.000.000	BAGIAN HUKUM
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Pesisir Selatan	20 Buku LD dan 5 Buku BD	50.000.000	Dana Transfer Umum		20 Buku LD dan 5 Buku BD	50.000.000	
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	45.000.000	Dana Transfer Umum		100%	45.000.000	
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pesisir Selatan	25 Dokumen	45.000.000	Dana Transfer Umum		25 Dokumen	45.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.416.921.150	Dana Transfer Umum		100%	1.416.921.150	
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	75%	265.000.000	Dana Transfer Umum		75%	265.000.000	
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pesisir Selatan	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	100.000.000	Dana Transfer Umum		1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	100.000.000	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN SDA
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	80.000.000	Dana Transfer Umum		Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % $\pm$ 1	80.000.000	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN SDA
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pesisir Selatan	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	85.000.000	Dana Transfer Umum		Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	85.000.000	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN SDA

4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	75%	270.000.000	Dana Transfer Umum		75%	270.000.000	
4	01		2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Pesisir Selatan	0	50.000.000	Dana Transfer Umum		0	50.000.000	
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	6 kali	150.000.000	Dana Transfer Umum		6 kali	150.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	13 Laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum		13 Laporan	70.000.000	BAGIAN PEMBANGUNAN
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kab. Pesisir Selatan	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	746.921.150	Dana Transfer Umum		40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	746.921.150	
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	79,04%		Dana Transfer Umum		79,04%		
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	100.131.600	Dana Transfer Umum		2 Dokumen	100.131.600	BAGIAN PBJ
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	546.192.150	Dana Transfer Umum		1 Dokumen	546.192.150	BAGIAN PBJ
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	150 orang	100.597.400	Dana Transfer Umum		150 orang	100.597.400	BAGIAN PBJ

4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kab. Pesisir Selatan	100%	135.000.000	Dana Transfer Umum		100%	135.000.000	
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum		1 Dokumen	35.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Dana Transfer Umum			50.000.000	
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Pesisir Selatan		50.000.000	Dana Transfer Umum			50.000.000	
									33.851.587.049				33.851.587.049	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Sekretariat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.424.627.976
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.815.000.000
4 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.400.000.000
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.000.000
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	380.000.000
4 01 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.000.000
4 01 01 2,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.000.000
4 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian	100.000.000
4 01 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.621.934.830
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
4 01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000
4 01 01 2,06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	150.000.000
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.071.934.830
4 01 01 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000
4 01 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
4 01 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	100.000.000
4 01 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	400.000.000
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.095.000.000
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.000.000
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.295.000.000
4 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000
4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.102.735.018
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	447.732.919
4 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.100.000
4 01 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	802.175.500
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.590.600

4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.135.999
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.890.000.000
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	900.000.000
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	210.000.000
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	700.000.000
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.400.000.000
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.350.000.000
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	750.000.000
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	300.000.000
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	344.958.128
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	81.165.531
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	83.126.284
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80.666.313
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.425.000.000
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	175.000.000
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.200.000.000
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	50.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.010.037.923
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	250.000.000
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	35.000.000
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	30.000.000
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	185.000.000
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.335.037.923
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.256.000.000
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.426.000.000
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	653.037.923
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	380.000.000
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	150.000.000
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	180.000.000
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.000.000
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	45.000.000
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45.000.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.416.921.150
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	265.000.000
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	80.000.000
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	85.000.000
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	277.000.000

4	01	`	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000.000
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	155.000.000
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	72.000.000
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	836.920.550
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	120.131.600
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	596.192.150
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120.597.400
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	140.000.000
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	40.000.000
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	50.000.000
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.000.000
JUMLAH						33.851.587.049

BAB V

PENUTUP

Dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Rencana Kerja 2026 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2026 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001